

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak termasuk dalam kabupaten/kota penghitung Indeks Harga Konsumen. Perkembangan dan pengendalian inflasi di dasarkan pada hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dan penting di Pasar Pemerintah yang dilakukan setiap hari. Terdapat 5 (lima) Pasar Pemerintah yang dijadikan obyek monitoring masing-masing :

1. Pasar Niaga Bersujud kecamatan Simpang Empat
2. Pasar Raya Bumi Pangeran Kecamatan Kusan Hilir
3. Pasar Nusa Indah Kecamatan Angsana
4. Pasar Sudan Raya Kecamatan Satui
5. Pasar Batulicin Kecamatan Batulicin

Angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Tanah Bumbu di Triwulan I Tahun 2025 cenderung mengalami kondisi fluktuatif hingga semakin menurun di akhir Triwulan I. Sempat cukup tinggi di awal Januari 2025 dengan kenaikan IPH 2,74 kemudian agak stabil di Februari 2025 di angka 0,84 kemudian turun cukup drastis di bulan Maret hingga mencapai -2,17.

Secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Tanah Bumbu pada Triwulan I tahun 2025 terdapat komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Komoditas **Cabai Merah Keriting** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 54.553,-, turun di bulan Februari menjadi Rp. 51.425,- dan naik secara signifikan di akhir Maret menjadi Rp. 70.305,-, Sementara untuk **Cabai Merah Besar** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 57.453,-, turun di bulan Februari menjadi Rp. 56.916,-, dan melonjak naik pada Maret menjadi Rp. 68.713,-, **Komoditas Bawang Merah** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 35.362,-, turun di bulan Februari menjadi Rp. 31.559,- dan naik kembali di akhir Maret menjadi Rp. 40.625,- Sementara untuk **Tomat** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 37.609,-, turun di bulan Februari menjadi Rp. 37.417,-, dan naik pada Maret menjadi Rp. 40.000,-, **Bawang Putih Honan** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 38.721,-, turun di bulan Februari menjadi Rp. 37.965,- dan naik kembali di akhir Maret menjadi Rp. 42.051,-

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan terus menerus selama triwulan I adalah **Daging Sapi** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 151.497,-, naik di bulan Februari menjadi Rp. 154.138,-, dan naik lagi menjadi Rp. 155.614,- di bulan Maret. **Daging Ayam Kampung** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 68.089,-, naik di bulan Februari di titik harga Rp. 68.956,-, dan naik lagi pada Maret menjadi Rp. 72.684,-, **Beras Medium** pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 13.972,-, mengalami kenaikan di bulan Februari menjadi Rp. 14.238,-, dan naik lagi pada Maret menjadi Rp. 14.387,-, **Minyakita** pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 16.763,-, naik di bulan Februari menjadi Rp. 16.898,-, dan naik lagi menjadi Rp. 17.172,- di bulan Maret

Komoditas yang mengalami penurunan terus menerus selama triwulan I adalah **Daging Ayam Ras** yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 31.132,-, turun di bulan Februari menjadi Rp. 31.003,-, dan turun lagi menjadi Rp. 30.737,- di bulan Maret. **Telur Ayam Ras**

yang pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 30.733,-, turun di bulan Februari di titik harga Rp. 29.978,-, dan turun lagi pada Maret menjadi Rp. 29.704,-, **Kedelai** pada bulan Januari memiliki harga rata-rata Rp. 15.544,-, mengalami penurunan di bulan Februari menjadi Rp. 14.908,-, dan turun lagi pada Maret menjadi Rp. 14.474,-.

Sementara kondisi harga yang cenderung stabil selama Triwulan I 2025 ini adalah **Beras Premium** yang memiliki harga rata-rata Rp. 16.700,-, **Gula pasir** di harga rata-rata Rp. 19.230,-, **Minyak goreng kemasan premium** yang memiliki harga rata-rata Rp. 20.400,-, **Mie Instant** di harga rata-rata Rp. 3.200,-, dan **Bawang Putih Kating** di harga rata-rata Rp. 40.000,-

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Penyebab utama tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Tanah Bumbu terutama di bulan Januari dan Februari 2025 adalah meningkatnya permintaan dan mobilitas pada menjelang Ramadhan akibat tingginya kebutuhan komoditi tertentu, terutama komoditas yang paling mempengaruhi IPH Tanah Bumbu yakni Daging Sapi, Bawang Merah dan Cabai Rawit Merah. Hal ini terjadi merata hampir di semua wilayah di Indonesia termasuk semua Kabupaten di Kalimantan Selatan dimana komoditas yang paling mempengaruhi peningkatan IPH di Kalimantan Selatan adalah tiga komoditas tersebut di atas.

Beberapa permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian inflasi diantaranya :

1. Pada tahap awal tidak cukup data dan informasi yang tersedia pada rantai pasok bagian mana perubahan dan kenaikan harga terjadi.
2. Belum tersedianya data yang memadai tentang kesenjangan antara produksi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting dengan kebutuhan konsumsi masyarakat per hari
3. Kenaikan beberapa harga komoditi seperti Cabe, Bawang Merah, Daging dan Telur Ayam terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan oleh masyarakat terutama pada menjelang bulan Ramadhan
4. Intervensi dan upaya pengendalian inflasi tidak dilakukan secara berkelanjutan, perubahan penurunan harga hanya bersifat sementara.
5. Upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan melalui kegiatan penanaman dan produksi khususnya tanaman pangan dan hortikultura diperlukan cukup waktu sehingga tidak dapat mengatasi kebutuhan dalam jangka pendek.
6. Produksi beberapa kebutuhan bahan pokok dan penting didalam daerah terbatas sehingga cukup tergantung pasokan dari daerah lain.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Salah satu upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Di triwulan I Tahun 2025 kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali yakni pada akhir bulan Februari hingga awal Maret untuk mengatasi tingginya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan tertentu menjelang memasuki bulan Ramadhan. Kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan bersama anggota TPID diantaranya

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Gudang BULOG Batulicin serta mitra kerja Pemerintah dan Badan Usaha diantaranya para distributor kebutuhan pokok, pelaku usaha mikro dan kecil, pelaku usaha industri kecil dan Lembaga Sosial Masyarakat.

Dalam upaya merespons tingginya harga cabai rawit yang sempat terjadi di pasar, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan kegiatan pembagian bibit tanaman cabai kepada masyarakat rumah tangga. Kebijakan ini terbukti sangat efektif menurunkan Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Tanah Bumbu hingga mencapai angka -2,10 di minggu pertama bulan Maret karena dapat mengendalikan harga cabai di pasar.

Kebijakan lain yang telah dilaksanakan adalah program kios pangan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Harapannya agar masyarakat menengah ke bawah bisa mengakses bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu sebagai upaya membangun sinergi stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam kerangka menjaga inflasi pangan tetap terkendali.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu juga telah mengupayakan fasilitasi akses keuangan daerah dengan mendorong Lembaga keuangan dan perbankan untuk percepatan dan kemudahan penyaluran kredit terutama untuk usaha mikro dan menengah. Meski demikian hal ini belum menunjukkan hasil optimal mengingat daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban ke Lembaga keuangan dan perbankan juga mengalami penurunan.

Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan yang dilaksanakan oleh Bulog di semua Kecamatan juga dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran Bantuan diterima oleh semua penerima manfaat dan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat di desa dalam menghadapi tantangan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus menjadi salah satu Kebijakan Pengendalian Inflasi di desa terutama dalam hal mengendalikan harga dan permintaan terhadap komoditi beras di pasaran.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan seperti kegiatan Gerakan Pangan Murah belum sistematis dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat karena hanya dilaksanakan dengan frekuensi yang terbatas terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
2. Kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi belum terintegrasi dari hulu ke hilir, karena terfokus di sisi peningkatan produktifitas dan pada upaya respons saat terjadi kenaikan harga di pasar, namun sering mengabaikan stabilitas pasokan dan efisiensi rantai pasok.
3. Beberapa Kegiatan yang dapat diklaim sebagai inovasi Pengendalian Inflasi daerah seperti program penanaman padi apung yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum dirasakan optimal karena masih dalam tahap percobaan.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan pengendalian harga menghadapi HBKN melalui optimalisasi pelaksanaan

Gerakan Pangan Murah disetiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pengendalian inflasi dikabupaten/kota perlu dilaksanakan secara terpadu dan tidak parsial, dengan lebih mendorong dan memperkuat tugas-tugas TPID kabupaten/kota yang disertai anggaran yang memadai.
3. Perlu melakukan identifikasi rantai pasok kebutuhan bahan pokok dan penting yang terbatas atau tidak dapat dipenuhi oleh daerah, dan ditindak lanjuti dengan Kerjasama dengan daerah penghasil, baik Kerjasama antar daerah maupun Kerjasama antar pelaku usaha.
4. Melakukan penguatan data dan informasi terkait produksi dan ketersediaan bahan pangan serta kebutuhan konsumsi masyarakat per hari setiap periodenya melalui optimalisasi Neraca Pangan
5. Memastikan distribusi bahan baku berjalan dengan lancar dan terus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk belanja secara bijak.